

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi diambil dari bahasa latin, *corruptio* dari kata kerja, *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi di Indonesia muncul pertama kali pada Kabinet Djuanda. Seiring perkembangannya permasalahan korupsi di Indonesia pun meningkat pesat, badan-badan pengawasan korupsi pun dibuat untuk mengurangi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Sampai pada akhirnya permasalahan korupsi besar-besaran pun muncul sampai mengakibatkan krisis moneter pada pemerintahan rezim orde baru, saat kelembagaan penindak korupsi yaitu Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dan komite Empat gagal memberantas korupsi pada jaman pemerintahan Orde Baru.

Tak bisa dipungkiri tindak pidana korupsi sampai saat ini telah menjadi budaya dan menjadi bahaya bagi bangsa ini. Berbagai undang-undang yang dibuat untuk menindak korupsi dan badan-badan pemerintah yang disusun untuk memberantas korupsi pun tidak begitu dihiraukan. Mulai dari berdirinya Operasi Budhi tahun 1963 di Orde lama hingga berdirinya KPK pada era Reformasi saat ini sama sekali tidak mengurangi tindak pidana korupsi yang ada, badan-badan dan lembaga ini hanya memberantas korupsi yang ada.

Menurut hasil survei *Transparency Internasional* mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesi, nilai IPK

(indeks persepsi korupsi) di Indonesia adalah 2,2. Nilai ini menempatkan Indonesia kedalam 159 negara tersurvei. Di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25 (terkorup 10) di atas India (8,9), Vietnam (8,67), Philipina (8,33) dan Thailand (7,33).

Dari permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak korupsi di Indonesia secara garis besar ditimbulkan dari lembaga-lembaga atau institusi-intitusi Negara yang berisikan orang-orang yang secara tidak langsung berasal dari kaum terpelajar yang mengerti tentang bahaya korupsi. Menurut John Girling seorang peneliti Independen, mantan Senior Fellow di Australia National University, Canberra, korupsi sebenarnya mewakili persepsi yang normatif dari eksekutif kapitalisme, yaitu kulminasi dari proses yang sistematis dari praktik-praktek kolusi yang terjadi diantara elite politik dan pelaku ekonomi, yang melibatkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak yang terjadi dari tindakan korupsi itu sendiri.

Dalam kasus korupsi, secara psikologis, korupsi bisa saja terjadi karena individu tersebut sudah memiliki kecenderungan (sifat) untuk berbuat curang. Korupsi tidak memandang pelakunya berasal dari golongan manapun. Kaum behavioris mengatakan, lingkungan merupakan aspek yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Keadaan seperti ini nampaknya akan terus berlangsung, jika budaya suap, sogok dan kolusi masih dipelihara. Solusinya perlu ditanamkan budaya anti korupsi sejak dini di masyarakat, mulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja dan lingkungan sekolah.

Lingkungan sekolah merupakan suatu lingkungan yang pertama kali kita hadapi untuk bersosialisasi dengan muka umum sejak umur manusia beranjak dari balita. Berbagai situasi, kondisi, serta perilaku mulai ditemui pada tahap mengawali kehidupan dalam kegiatan sekolah. Pendidikan dan

moral mulai diterapkan dan mulai ditemui di kehidupan sekolah. Hal ini merupakan suatu kehidupan sosialisme yang perlu diperhatikan sejak dini, dan menjadi awal untuk menciptakan suatu budaya dan perilaku baru sejak dini terhadap anak-anak untuk dapat mencermati akan bahaya korupsi dan bagaimana cara mewaspadainya melalui berbagai perilaku yang bisa ditemui di lingkungan sekolah.

## **1.2 Ruang Lingkup Permasalahan**

Permasalahan utama dalam topik ini antara lain adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM di masa depan yang cermat akan bahaya korupsi melalui pendekatan komunikasi visual ?
- Bagaimana cara menanamkan budaya waspada korupsi kepada anak-anak agar mereka mencermati dan memahami akan bahaya korupsi ?

Batasan / ruang lingkup permasalahan topik ini adalah menanamkan budaya waspada korupsi sejak dini kepada anak-anak agar mereka mengerti akan bahaya korupsi melalui media kampanye dengan pendekatan akan bahaya korupsi yang lebih sederhana seperti penerapan sifat kejujuran guna menjauhi bahaya korupsi di lingkungan anak-anak.

### **1.3 Tujuan Perancangan**

Adapun tujuan pembahasan dari topik yang dibahas adalah :

- Meningkatkan kualitas SDM di masa depan yang cermat akan bahaya-bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari korupsi.
- Mengenalkan waspada korupsi dan menanamkan nilai-nilai moral yang bersih dan jujur kepada anak-anak sejak dini agar mereka memahami dan mencermati akan bahaya korupsi yang terjadi di masa depan, mulai dari hal terkecil tentang korupsi yang bisa mereka temui di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kejujuran melalui media kampanye.

### **1.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dalam mengerjakan Tugas Akhir ini penulis memperoleh data dengan:

- Wawancara dengan narasumber dan target audience.
- Observasi langsung terhadap sekolah - sekolah Dasar, murid Sekolah Dasar, dan lembaga yang terkait.
- Studi Pustaka

## 1.5 Skema Perancangan

